

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwasannya kebijakan penanggulangan banjir yang dilakukan oleh kedua Gubernur antara Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan memiliki dua fokus utama yang berbeda dimana pada era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama membangun sebuah sistem pengendalian air atau sistem drainase yang dapat berfungsi untuk mengalirkan air secepat mungkin ke laut sehingga genangan atau banjir dapat di hindarkan sedangkan pada era kepemimpinan Anies Baswedan memiliki fokus agar air yang datang baik dari hujan yang turun maupun air kiriman dari hulu dapat terlebih dahulu di resapkan oleh tanah di wilayah DKI Jakarta hal ini memiliki tujuan agar air tanah di Jakarta dapat terisi kembali sehingga pada akhirnya sistem drainase yang dilakukan terfokus kepada hal-hal yang diinginkan oleh *top leader* atau Gubernur DKI Jakarta pada masa kepemimpinannya.

Saat melakukan pengumpulan data, peneliti menyadari bahwa terdapat kesulitan untuk menggali informasi yang lebih komprehensif akibat beberapa informan yang sulit ditemui disela-sela aktivitasnya ataupun menolak untuk diwawancarai dengan alasan tertentu. Selain itu terdapat pertanyaan yang cenderung dijawab secara normatif oleh informan ataupun memilih tidak menjawab hingga statement yang disampaikan tidak berkenan untuk ditulis oleh peneliti pada penelitian ini.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti memberikan beberapa saran yaitu *Pertama*, kepada pemangku kebijakan upaya penanggulangan banjir di DKI Jakarta, diharapkan untuk terus secara konsisten dan disiplin melakukan upaya-upaya pencegahan banjir secara berkelanjutan dengan mengacu pada aturan ataupun regulasi yang sudah ditentukan baik itu dalam bentuk Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Intruksi Gubernur, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ataupun Rencana Strategis Daerah maupun nasional hal dikarenakan melihat histori upaya penanggulangan banjir yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sering terjadi perubahan disetiap periode nya atau perubahan akibat bergantinya Gubernur yang memimpin sehingga program yang belum sempat diselesaikan terselesaikan harus terbengkalai begitu saja. Hal ini terjadi pada program Normalisasi Sungai yang telah dilakukan pada era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama terhenti atau tidak dilanjutkan kembali pada masa kepemimpinan Anies Baswedan. Ini pun memberikan dampak yang cukup signifikan dimana program yang dilakukan tidak dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat.

Kedua, masih kepada pemangku kebijakan upaya penanggulangan banjir di DKI Jakarta untuk mulai fokus dan memperhatikan dan melakukan observasi daerah-daerah ataupun wilayah yang sebelum nya tidak terdampak banjir dimana untuk ditinjau kembali apakah memang daerah tersebut secara sistem drainase ataupun wilayah tersebut aman dari dampak banjir (memiliki dataran yang tinggi) hal ini seperti yang sebelumnya terjadi pada tahun 2021 dimana wilayah Kemang,

Jakarta Selatan pada banjir sebelumnya tidak pernah terdampak namun di tahun 2021 menjadi wilayah yang cukup terdampak banjir sedangkan beberapa kawasan di Jakarta Utara yang biasanya terdampak banjir di Februari 2021 lalu tidak terdampak sama sekali, kejadian tersebut cukup menjadi faktor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meninjau kembali daerah-daerah di DKI Jakarta secara lebih komprehensif (tidak hanya fokus ke titik-titik genangan lama) dalam upaya penanggulangan banjir.

Ketiga, kepada masyarakat DKI Jakarta untuk lebih memperhatikan kembali saluran-saluran air yang berada di sekitar tempat tinggal nya. Karena tidak dapat dipungkiri salah satu faktor penyebab banjir yang terjadi tidak hanya karena limpasan air dari saluran-saluran utama (sungai dan kali) tapi juga akibat terhambatnya saluran-saluran kecil yang ada disekitar pemukiman warga, sehingga air tidak dapat mengalir sebagaimana mestinya. Masyarakat diharapkan untuk menjaga kebersihan saluran drainase yang disekitar mereka dari sampah maupun lumpur sedimen hingga tidak menyebabkan saluran mampet apabila musim penghujan tiba. Hal ini pun turun dapat membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya penanggulangan banjir di Jakarta tidak dapat dipungkiri keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sulit untuk menjangkau saluran-saluran kecil di wilayah pemukiman warga karena lebih difokuskan kepada saluran-saluran utama atau saluran yang lebih besar seperti 13 aliran sungai yang mengalir di Jakarta. Maka daripada itu perlu adanya kesadaran bagi warga DKI Jakarta untuk turut membantu upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya penanggulangan banjir di Jakarta atau bila

diperlukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat suatu peraturan untuk menegaskan agar masyarakat memperhatikan kebersihan lingkungan atau saluran air di tempat pemukimannya.